

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian di dalam tulisan ini akan membahas tentang diplomasi pemerintah Indonesia kepada induk organisasi sepakbola dunia, FIFA. Dimana diplomasi dilakukan berdasarkan tindakan asosiasi sepakbola Indonesia, PSSI yang melakukan pelanggaran statuta induknya yaitu FIFA. Seperti yang pernah diketahui bahwa tahun 2011 sampai 2013 muncul konflik berkepanjangan di tubuh PSSI. Kronologi konflik tersebut sebagai berikut. Pada tahun 2011 muncul kisruh PSSI Nurdin Khalid dengan adanya Liga Premier Indonesia. Kelahiran sebuah liga sepakbola Indonesia bernama Liga Premier Indonesia (LPI) sebagai langkah besar untuk menjatuhkan Nurdin Khalid dari kursi ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Liga tersebut dipegang oleh seorang pengusaha bernama Arifin Panigoro, dimana ia berambisi untuk menjadi ketua umum PSSI. Sebelum adanya LPI, para lawan politik Nurdin melakukan sebuah kongres sepakbola nasional (KSN) yang dibuat oleh seksi wartawan olahraga (SIWO) bertempat di Malang pada 29 Maret 2010. Pada waktu itu banyak pihak tidak puas dengan kepemimpinan Nurdin dengan terpuruknya tim sepakbola Indonesia, akibatnya banyak elemen pecinta sepakbola nasional menginginkan perubahan. Seperti ungkapan Arifin Panigoro “sepakbola bukan punya PSSI saja, ini olahraga rakyat. Jadi besok itu suara rakyat!”¹ Kelahiran liga tersebut sangat dipaksakan dan melanggar aturan dari lembaga sepakbola internasional Federation Internationale de Football Association (FIFA).

Pada tanggal 20 Mei 2011 PSSI menyelenggarakan Kongres di Jakarta, dimana kongres bertujuan untuk pemilihan pengurus baru PSSI periode 2011-2015 sekaligus menyelesaikan konflik PSSI dengan LPI. Namun sebelum menyenggarakannya, PSSI harus membentuk Komite Banding, PSSI membentuk Komite Banding berdasar Standard Electoral Code FIFA pasal 4 mengatur tentang Komite Pemilihan dan Komite Banding, dimana mengatakan;

¹ Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola, Ke mana Arah Tendangannya?*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 121. Lihat di www.inilah.com/29/3/2010

*The general assembly or the body that represents it between congresses also elects three substitute members of the electoral committee as well as the three members of the election appeal committee and two substitutes members of the appeal committee.*²

Setelah itu, terpilih anggota-anggota dari komite tersebut sesuai dengan surat keputusan pengurus PSSI No. SKEP/11/NH/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 ditandatangani ketua umum Nurdin Khalid, menunjuk Anggota Komite Banding yaitu tiga anggota tetap Prof.Dr. Tjipta Lesmana,A.A., Prof.Dr.Gayus Lumbuun,S.H., dan Alfred Simadjuntak S.H. ditambah dua anggota pengganti Max Boboy S.H. dan Triandy Mulkan S.H. pada tanggal yang sama 11 Februari 2011, pengurus mengirim surat ke FIFA untuk memberitahukan pembentukan komite pemilihan dan komite banding PSSI. Tujuan komite ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan ketua umum, wakil ketua, dan Anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015 secara transparan, fairness, dan demokratis. Setiap calon ketua umum dan wakil ketua umum serta calon komite eksekutif yang tidak lolos seleksi hanya bisa melakukan banding ke Komite Banding.

Pemilihan calon ketua PSSI segera dilakukan oleh pengurus PSSI. Beberapa tokoh muncul sebagai kandidat, antara lain Nurdin Khalid, Nirwan Bakri, Arifin Panigoro, George Toisutta. Namun dalam hasil seleksi, Arifin Panigoro dan George Toisutta tidak lolos seleksi sebagai calon ketua dan wakil ketua umum PSSI periode 2011-2015 berdasar keputusan Komite Banding. Hal itu jelas menimbulkan protes dari kubu yang ditolak dan beberapa aksi besarpun terjadi atas peristiwa tersebut. Untuk meredakan semua pihak yang berkonflik, maka Komite Banding mengambil keputusan pada tanggal 25 Februari 2011 di Hotel Santika, Jakarta, dimana Komite Banding menolak nominasi ke empat calon. Keputusan tersebut diterima oleh FIFA, dengan ditegaskan oleh presiden FIFA Sepp Blater dalam pertemuannya dengan Rita Subowo ketua KONI/KOI di markas besar FIFA di Zurich, Swiss.³ Setelah itu, Komite Pemilihan dan Komite Banding mulai bersiap untuk melakukan kongres sesuai aturan , namun semua tindakan mereka tindakan mereka tidak berhasil, karena gagal dalam.

²*Ibid*, hal. 215

³*Op.cit*, hal. 253

Kemudian untuk meredakan konflik perebutan kekuasaan PSSI antara kubu Nurdin Khalid dengan Arifin Panigoro, pada tanggal 9 hari Sabtu, Bulan Juli 2011 diadakan kongres PSSI di Solo. Kongres tersebut dihadiri oleh perwakilan dari FIFA, yaitu Primo Carvaro, Frank van Hattum, dan Jay Singh Muthiah. Selanjutnya dari AFC, yaitu Alex Soosay, James Johnson, dan Lazarus.⁴ Dari pihak Indonesia terdapat Andi Malarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Rita Subowo dari KOI/KONI.

Kongres di Solo sukses dijalankan dengan menghasilkan seorang ketua dan wakil ketua PSSI baru masa jabatan 2011-2015, yaitu Djohar Arifin Husein dan Farid Rahman. Kemudian kedua orang tersebut dibantu oleh Sembilan anggota Komite Eksekutif, antara lain; Sihar Sitorus, La Nyala M. Mattalitti, Mawardy Nurdin, Robertho Rouw, Widodo Santoso, Erwin Dwi Budiawan, Tuty Dau, Tony Apriliani, dan Bob Hippy.

Terpilihnya pimpinan PSSI yang baru memberikan sedikit harapan kepada masyarakat Indonesia dalam melihat perkembangan sepakbola bangsa menuju lebih baik. Setelah Djohar memegang tampuk kekuasaan PSSI, harapan masyarakat mulai memudar karena terjadi sebuah konflik internal baru dalam tubuh PSSI. Hal tersebut tidak lepas dari keputusan ketua baru yang dianggap mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversi, antara lain;⁵ Pemecatan Alfred Riedl sebagai pelatih timnas Indonesia, mengakhiri kontrak hak siar ANTV, membubarkan PT Liga Indonesia, kontroversi pengangkatan Arya Abhiseka, Bernard Limbong dan Saleh Mukadar, kontroversi tidak ikutnya Persipura di Liga Champion Asia, pemecatan 4 Anggota Exco; yaitu La Nyala Mattalitti, Erwin D. Budiawan, Robert Rouw, dan Toni Aprilia.

Tindakan Djohar Arifin tersebut memunculkan perlawanan sistematis terhadap kepemimpinan Djohar, ditandai dengan dibentuknya Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) beranggotakan 442 dari 578 anggota PSSI. Beberapa pernyataan yang dibahas KPSI saat melakukan pertemuan pada hari Minggu, 18 Desember 2011 di hotel Pullman, Jakarta, antara lain;⁶

⁴ <http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/perwakilan-fifa-dan-afc-pantau-kongres-48041.html>

⁵ *Op.cit*, hal. 261-268

⁶ <http://sport.detik.com/sepakbola/read/2011/12/19/002218/1794059/76/dibentuk-komite-penyelamat-sepakbola-indonesia>

1. Menyatakan mosi tidak percaya pada PSSI, wakil ketua EXCO Sihar Sitorus, Widodo Santoso, Tuty Dau, dan Bob Hippy
2. Menyelenggarakan KLB dengan agenda pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif, paling lambat 30 Maret 2011
3. Meminta PSSI untuk memberikan jawaban KLB selambat-lambatnya 23 Desember 2011
4. Membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia dengan ketua Tony Apriliani, serta La Nyala Mattalitti, Robert Rouw, Erwin Dwi Budiawan, Benhur Tomi Mano, M. Hasan, Dody Alex Noerdin, FX. Rudi Hadyatmo, Sumaryoto, Hardi Hasan, dan Beno Dollo sebagai anggota. Komite ini bertugas memastikan diselenggarakannya KLB PSSI. Dan apabila PSSI tidak bersedia, maka dengan ini kami memberikan kewenangan penuh kepada Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia untuk menyelenggarakan KLB PSSI sesuai statute PSSI.
5. Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia juga akan bertugas menjalankan roda organisasi PSSI sesuai hasil kongres II di Bali, termasuk memproteksi kredibilitas dan integritas PSSI dan anggotanya sampai terpilihnya Komite Eksekutif yang baru.

Dari dinamika konflik dalam kubu PSSI tersebut membuat FIFA beberapa kali mengeluarkan peringatan, namun tidak sampai menjatuhkan sanksi. Peringatan – peringatan FIFA tersebut antara lain; pertama, tentang kisruh PSSI dengan penyelenggaraan LPI. FIFA menekan PSSI agar segera menghentikan liga tersebut, seperti isi surat FIFA ke PSSI tertanggal 10 Februari 2011, dimana memerintahkan PSSI;

*“sanctioned the respective affiliated clubs, officials, and players participating in the Liga Premier Indonesia (LPI) according to the PSSI Statutes and relevant regulations. On this regard, we stress our agreement on and the importance of taking these measures which should normalize the situation within the territory of PSSI”.*⁷

FIFA melarang liga tersebut sesuai statuta yang menyebutkan *“an organization that is subordinate to an Association”*; sebuah organisasi (sepakbola) yang berada di bawah naungan Asosiasi (PSSI). LPI merupakan liga yang bukan di bawah asosiasi PSSI, sehingga tidak diakui FIFA, dan disebut *“illegal league, “breakaway league”, “runaway*

⁷ *Op.cit*, hal. 139

league". Ancaman juga datang dari Konfederasi Sepakbola Asia, melihat kisruh sepakbola yang terjadi di Indonesia, Sekretaris Jenderal FIFA, Thierry Regenass, di Doha, Qatar menyatakan "jika besok kompetisi (LPI) tetap digelar, FIFA akan menjatuhkan sanksi (terhadap indonesia)".⁸

Permasalahan kedua yang timbul setelah itu adalah kegagalan kongres PSSI tentang pemilihan pengurus periode 2011-2015. FIFA mengeluarkan pernyataan keras agar kongres segera dilaksanakan, namun pada rapat Komite Eksekutif FIFA 30 Mei 2011, memutuskan memberi kesempatan lagi kepada PSSI untuk menggelar pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif PSSI 2011-2015, paling lambat 30 Juni 2011. Selain itu, FIFA menekankan lagi supaya Liga Premier Indonesia di bawah kendali PSSI. Jika syarat-syarat tidak dipenuhi sampai batas waktu ditentukan, maka PSSI akan dibekukan pada 1 Juli 2011.⁹

Permasalahan ketiga adalah munculnya konflik antara PSSI dengan KPSI. Terjadinya konflik dualisme tersebut membuat FIFA mengeluarkan pernyataan keras lagi kepada PSSI Djohar Arifin untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai 25 Juni 2012. Keputusan itu disampaikan FIFA dalam rapat Komite Eksekutif mereka di Zurich, Swiss, pada Jumat 30 Mei 2012.¹⁰ Desakan dari FIFA untuk penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan oleh PSSI, kemudian diundur lagi hingga 10 Desember 2012 dan semuanya gagal.¹¹

Pada 14 Desember 2012 hari Jumat, melalui rapat Exco FIFA di Jepang, Sepp Blatter memutuskan untuk memberikan kesempatan sekali lagi bagi Indonesia agar konflik PSSI dengan KPSI segera diselesaikan, dengan batas waktu paling lambat bulan Maret 2013. Blatter mengungkapkan "semula saya beropini untuk sudah saatnya berhenti di sini, tapi Exco berpendapat lain, Jadi ini seperti memberi kado natal atau kado akhir tahun buat Indonesia karena tidak dihukum". Blatter mengatakan juga "bahwa Indonesia punya waktu

⁸ Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola, Ke mana Arah Tendangannya?*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 121. Lihat di www.beritajatim.com/7/01/2011

⁹ Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola, Ke mana Arah Tendangannya?*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 121. Lihat di www.kompas.com, 1/6/2011, hal 31

¹⁰ *Op.cit*

¹¹ <http://www.tempo.co/read/news/2012/12/14/099448262/Sanksi-FIFA-untuk-Indonesia-Ditunda-Februari-2013>

hingga Maret untuk menyelesaikan tentang dualisme kepengurusan, dan nasib PSSI akan ditentukan FIFA pada rapat Exco 20-21 Maret 2013.¹²

Peringatan kepada PSSI juga datang dari konfederasi sepakbola Asia (AFC) sebagai perwakilan FIFA di Asia melalui presidennya Zhang Jilong ketika berkunjung ke Indonesia mengungkapkan hal serupa dengan FIFA, bahwa jika masalah dualisme tidak segera di selesaikan, maka Indonesia bisa mendapatkan sanksi berupa pencabutan jatah untuk ikut serta dalam AFC CUP.

Melihat keseriusan FIFA untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI, pemerintah melalui Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Andi Malarangeng, harus melakukan tindakan untuk menjauhkan PSSI dari sanksi. Tujuan pengangkatan itu hanya untuk menyelesaikan konflik PSSI dengan KPSI, Roy Suryo juga pernah mengatakan ketika baru diangkat menjabat MENPORA “Paling penting prioritas saya adalah soal PSSI. Kita punya tenggat waktu, saya tidak mau berjanji, tapi saya harus gerak cepat”.¹³

B. Tujuan Riset

Ketika berbicara tentang topik menyangkut olahraga, merupakan hal yang sering terdengar di telinga, apalagi olahraga yang didiskusikan menyangkut sepakbola. Tetapi yang banyak orang perbincangkan kebanyakan pada sisi permainan atau pemain yang berada pada medan lapangan, dan jarang mengupas permasalahan yang terjadi pada badan atau lembaga yang membuat aturan-aturan game tersebut. Di Indonesia, terdapat federasi sepakbola bernama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), organisasi ini mengatur dan mengelola persepakbolaan di negeri ini. Walaupun ia menjadi badan tertinggi sepakbola nasional, akan tetapi segala statutenya harus berkiblat pada statuta induk sepakbola dunia yaitu Federation Internationale de Football Association (FIFA). Dimana, ia berkedudukan sebagai organisasi yang menaungi dan sekaligus menjadi wadah berkumpulnya asosiasi sepakbola masing-masing Negara. Oleh sebab itu, semua Negara yang menjadi anggotanya harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan olehnya. Beberapa anggota FIFA pernah mendapatkan sanksi, karena melanggar undang-

¹² <http://bola.viva.co.id/news/read/375155-blatter--indonesia-dapat-kado-natal-dari-fifa>

¹³ Op.cit

undang yang diciptakan FIFA. PSSI sendiri hampir mengalami nasib serupa dengan asosiasi sepakbola lainnya, karena dianggap melanggar statute FIFA, namun sanksi tersebut urung diterimanya karena diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada FIFA. Dari peristiwa yang sudah dipaparkan dan akan dibahas, tulisan ini mempunyai tujuan untuk yaitu:

1. Mengetahui proses diplomasi Indonesia ke FIFA
2. Mengetahui proses pengambilan keputusan di FIFA
3. Menjelaskan proses negosiasi suatu negara ke FIFA

C. Kontribusi Riset

Suatu ciptaan yang diciptakan oleh sang Maha kuasa pasti mempunyai sebuah makna atau kegunaan. Seperti penciptaan segala makhluknya yang terdapat di Bumi, dimana masing-masing mempunyai fungsi dan saling melengkapi. Manusia sebagai makhluk Tuhan paling sempurna juga mempunyai kemampuan untuk membuat suatu karya yang bisa berguna bagi sesamanya dan lingkungannya. Seiring dengan kompleks dan majunya permasalahan di Dunia, keikhlasan hidup ini sering digandeng dengan sebuah isu motif balas budi, sehingga mengakibatkan kemaslahatan berubah menjadi keserakahan. Ketika seorang manusia berkeinginan membuat hidup ini menjadi beragam dengan penemuan barunya, maka dia akan cenderung memunculkan kemaslahatan khusus bagi pribadinya karena pengaruh tidak ada yang gratis di dunia.

Namun terlepas dari itu semua, setiap orang mendapatkan hak untuk memperoleh hasil dari apa yang dia ciptakan, yang terpenting ciptaanya bisa mengubah hidup menjadi mudah dan bermakna. Sebagai penyusun dalam tulisan ini, kami mengambil dan membahas sebuah permasalahan klasik, namun masih layak untuk diperdebatkan. Ketikan ini mencoba untuk mengetahui diplomasi sebuah organisasi olahraga nasional kepada induk sepakbola internasional. Pemaparan tentang bahasan tersebut akan dibahas pada kalimat-kalimat berikutnya. Sama seperti apa yang telah dilakukan oleh sang pencipta dan para pembuat inovasi, bahwa kami sebagai penyusun mempunyai harapan akan tulisan ini sehingga memberikan manfaat, antara lain;

1. Orang-orang bisa lebih mengetahui bahwa olahraga dan khususnya sepakbola, bukan hanya tentang kesehatan, solidaritas, kebersamaan dan kesatuan kekuatan, namun lebih dari itu ia berbicara menyangkut diplomasi guna memberikan kebaikan bagi masyarakat luas.
2. Memperkenalkan Persatuan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA).

D. Rumusan Masalah

Dari pernyataan pemberitaan di atas sebelumnya, maka penyusun mempunyai pertanyaan dan berkeinginan untuk mencoba mencari jawaban-jawabannya seperti terlampir di bawah, yaitu;

“Bagaimana Diplomasi Pemerintah Indonesia Kepada FIFA Supaya PSSI Tidak Mendapatkan Sanksi FIFA, Terkait Dualisme PSSI (2013)?”.

E. Studi Pustaka

Setiap karya tentang sebuah tulisan merupakan sebuah kelanjutan atau pengembangan dari karya sebelumnya, apalagi jika tulisan tersebut menyangkut pengetahuan sosial dan politik. Seperti tulisan yang berjudul *“Diplomasi Indonesia Kepada Federation Internationale de Football Association (FIFA) Studi Kasus; Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) 2011-2013”* dan dipaparkan ini, penyusun akan merangkainya berdasarkan informasi atau sumber yang tercipta sebelumnya dan pemberitahuan dari actor yang terlibat. Hal itu dilakukan demi menjamin kepercayaan pembaca akan kebenaran yang tidak mutlak. Walaupun tulisan ini merupakan pengelembungan dari karya lainnya, akan tetapi untuk mengatakan bahwa tulisan ini belum ada yang pernah menulis sebelumnya, maka akan disampaikan tulisan yang berkaitan dengan tulisan ini.

Sebuah tulisan berjudul *“Upaya Diplomasi Publik Pemerintah Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Sepakbola Indonesia di Dunia Internasional (studi kasus dualisme kepengurusan PSSI tahun 2011-2012)”*, disusun oleh Marizky Haroo Uasni. Dia menekankan olahraga menjadi sebuah pendekatan *soft diplomacy* oleh sebuah negara dalam

membentuk perspektif publik internasional mengenai pencitraan bangsa di dunia internasional.¹⁴

Penelitian Marizky menyebutkan bahwa sebelumnya sepakbola adalah hanya sekedar hobi dan olahraga untuk menyehatkan badan. Namun saat ini, sepakbola bertransformasi yang mempunyai fungsi sebagai sebuah alat atau media diplomasi antar negara. Seperti yang pernah terjadi pada event Piala Dunia di Jepang dan Korea Selatan. Melalui turnamen sepakbola dunia tersebut, kedua negara bisa menciptakan hubungan yang sangat baik, walaupun hubungan tersebut, sudah terbina dari sebelumnya. Kedua negara menjadikan pendekatan sepakbola sebagai alat diplomasi. Dari itu, saat ini semua negara memanfaatkan sepakbola sebagai sarana diplomasi yang efektif bagi mereka.

Pada tahun 2011-2012 adalah terjadinya dualisme liga yaitu antara LSI dengan LPI. Selanjutnya muncul konflik PSSI dengan KPSI yaitu antara Djohar Arifin dengan La Nyala Mattalitti. Akibatnya, pertama, saat tim Indonesia kalah dari Bahrain 10-0, hal ini menyebabkan nama timnas Indonesia tercoreng di mata masyarakat internasional, karena dianggap telah terjadi pengaturan skor. Kedua, Dualisme berdampak pada keuangan pemain terutama masalah gaji. Dalam waktu bersamaan, karena tunggakan gaji tersebut, seorang pemain asing bernama Diego Mendieta yang bermain di Indonesia tidak bisa menerima gaji sehingga, tidak mampu membeli kebutuhan sehari-harinya, sehingga meninggal dunia. Hal itu menyebabkan adanya desakan untuk mengurus permasalahan HAM dalam sepakbola Indonesia.

Untuk menyingkirkan anggapan para pengamat sepakbola dunia tentang permasalahan yang menimpa sepakbola Indonesia, maka pemerintah Indonesia menggerakkan diplomasi publik sebagai perbaikan citra sepakbola nasional. Diplomasi publik yang cenderung digunakan pemerintah yaitu diplomasi kebudayaan dalam bidang olahraga. Dimana diplomasi tersebut bisa menjadi *soft diplomacy* bagi sebuah negara dalam rangka mengubah perspektif publik internasional tentang pencitraan bangsa di dunia internasional. Selain itu, diplomasi tersebut harus didukung oleh upaya internal menyelesaikan kisruh PSSI dengan KPSI dengan melibatkan pemerintah melalui menpora.

¹⁴ Marizky Haroo Uasni. Diambi dari eJournal Ilmu Hubungan Internasional, fisp-unmul.org 2014, 2 (1) : 183 : 194

Kemudian didukung juga oleh perbaikan kualitas timnas Indonesia dalam pertandingan sepakbola internasional.

Menurut Andre Vincent Wenas dalam tulisannya yang berjudul diplomasi “Pingpong” dan politik “dagang sapi” menjelaskan bagaimana keefektifan dan keefisienan diplomasi dapat diraih dalam langkah yang sederhana seperti yang dilakukan Zhuang Zedong atlet tenis meja Cina terhadap Glenn Cowan pada awal era tahun 70-an semasa perang dingin hubungan blok barat dan timur masih ditandai dengan batasan yang keras. Pada saat itu seorang Zhuang Zedong mampu mencairkan rivalitas kedua negara dengan berbasa basi dan memberikan tanda mata kepada atlet Amerika Serikat (AS) Glenn Cowan berupa selembar kain sutra bergambar pegunungan Huangshan- sebuah produk terkenal dari Hangzhou.¹⁵

Insiden sederhana ini sampai ketelinga para petinggi politik Cina, dan ujungnya mengundang tim tenis meja AS untuk melakukan beberapa pertandingan persahabatan di Cina. Akhirnya kontak diplomasi pingpong ini meluas spektrumnya ke arah politik. Sampai akhirnya presiden Richard Nixon berkunjung ke Beijing.¹⁶

Fenomena internasional tersebut yang terlihat sederhana ternyata menarik untuk tarik benang merah perjalanannya di belahan dunia yang satu insiden atlet pingpong dua negara yang sedang bermusuhan dalam perang ideologis justru dimanfaatkan untuk dijadikan semacam “*beach-head*” untuk membuka “*niche-market*” yang bakat merintis kehubungan diplomatik lalu ke relasi politik dan perdagangan yang lebih luas dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa. Sekarang ini kita bisa melihat ada banyak sekali perusahaan multi nasional dari AS yang telah menanamkan investasi di Cina, demikian juga sebaliknya air bah produk made in Cina begitu membanjiri setiap pelosok Amerika. Dari diplomasi yang sederhana ini mencirikan bahwasanya langkah yang sederhana yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain dapat memberikan efek positif yang besar hingga melewati spektrum yang terbatas.¹⁷

¹⁵ Majalah marketing, 03/XIII/Maret 2013

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

Penelitian Indra Putra Yastika Rivai yang berjudul Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani Rasisme Di Sepakbola Italia menyatakan bahwa rasisme merupakan fenomena yang tidak asing dalam dunia sepakbola, terutama di Eropa. Sebagai asosiasi yang menangani sepakbola di Eropa, UEFA(The Union of European Football Associations) mengeluarkan regulasi dan kebijakan anti-rasisme untuk mengurangi kasus rasisme di dunia persepakbolaan Eropa. Pada Desember tahun 2000, UEFA menguatkan regulasinya untuk memerangi rasisme dalam pertandingan sepakbola di semua kompetisi di Eropa. Sebagai negara dengan tingkat rasisme tertinggi, Italia menjadi sorotan yang tajam oleh UEFA karena banyaknya kasus besar mengenai rasisme di sepakbola. Aturan dan regulasi UEFA yang diterapkan belum mampu mengurangi tingkat rasisme sepakbola di Italia. Hingga tahun 2013, jumlah kasus rasisme di liga sepakbola Italia malah semakin meningkat.¹⁸

Dengan serangkaian tindakan seperti mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan finansial bagi proyek anti rasisme yang diluncurkan oleh asosiasi sepakbola masing-masing negara Eropa, hingga mengirimkan surat kepada setiap asosiasi yang menjabarkan tentang pentingnya bekerjasama dengan partner yang memiliki keahlian dalam isu rasisme, UEFA masih belum bisa menyelesaikan kasus rasisme tersebut. Padahal olahraga memiliki banyak afiliasi dengan banyak sektor seperti ekonomi, politik hingga sosial kemasyarakatan. Apalagi ditemukan bahwa ketidakefektifan kampanye anti rasisme karena rasisme itu terjadi di luar sistem pertandingan, artinya rasisme bukan berasal dari ofisial pertandingan, namun berasal dari suporter. Seperti diketahui bahwa suporter merupakan representasi masyarakat Italia, sehingga masyarakat dunia memaknai rasisme adalah karakter masyarakat setempat. Tentunya ini mencerminkan kegagalan diplomasi UEFA kasus rasisme sepakbola di Italia dan penggambaran wajah Italia yang tidak ramah terhadap pihak lain di luar mereka.¹⁹

Dari penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, Marizky Haroo Uasni meneliti tentang Upaya Diplomasi Publik Pemerintah Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Sepakbola Indonesia di Dunia Internasional (studi kasus dualisme kepengurusan PSSI

¹⁸ Jurnal Analisis Hubungan Internasional, universitas Air Langga Vol. 3 / No. 3 / Pub. 2014-09 /

¹⁹ *ibid*

tahun 2011-2012), melihat langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki citra sepakbola yang telah tercoreng. Andre Vincent Wenas dalam tulisannya yang berjudul diplomasi “Pingpong” dan politik dagang sapi yang membahas keefektifan dan keefesienan diplomasi sederhana yang berdampak besar, selanjutnya penelitian Indra Putra Yastika Rivai yang berjudul Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani Rasisme Di Sepakbola Italia, dimana UEFA gagal melakukan diplomasi untuk menekan angka rasisme dalam geliat sepakbola di Italia.

Sedangkan dalam riset ini, penulis akan meneliti tentang diplomasi sebuah pemerintah terhadap organisasi internasional non-pemerintah (OINP) untuk memperbaiki hubungan asosiasi sepakbola pemerintah tersebut dengan OINP sebagai induknya. Pemerintah yang dimaksud yaitu Indonesia dan asosiasi adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, sedangkan OINP yaitu FIFA. Jadi ditegaskan lagi, dalam tulisan ini membahas tentang diplomasi sebuah negara terhadap sebuah OINP untuk melanjutkan hubungan organisasinya yang telah lama terjadi. Selain itu jangka waktu permasalahan yang diteliti dalam kasus ini antara 2011 sampai 2013. Oleh sebab itu, riset yang dilakukan penulis, berbeda dengan riset yang dilakukan dan dipaparkan sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

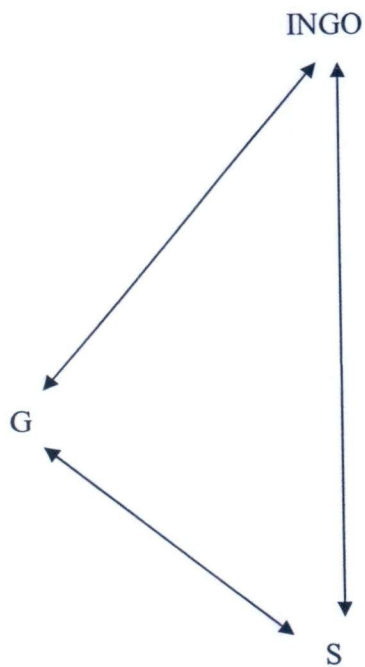
Menjawab suatu pertanyaan mungkin adalah kegiatan manusia sehari-harinya, namun terkadang jawaban yang diberikan oleh seorang belum tentu memberikan kepuasan bagi pendengarnya, apalagi jika membutuhkan penyelesaian dan solusi atas pertanyaan tersebut. Setiap orang mempunyai jawaban berbeda dan tingkat kepuasan berbeda atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, begitu juga dengan penyusunan jawaban atas masalah dalam tulisan ini. Namun penulis akan mencoba memberikan kepuasan dan pengetahuan tentang jawaban permasalahan yang di bahas dalam karya ini dengan menggunakan teori atau kerangka pemikiran dan konsep yang menurut penulis sesuai dengan permasalahan.

Landasan pola dasar dalam penelitian ini menurut kajian hubungan internasional yaitu adanya hubungan segitiga antara *Federation Internatinal de Football Association*

(FIFA), pemerintah Republik Indonesia (*Government*), dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Gambar 1.1

Pola hubungan antara INGO, pemerintah, dan masyarakat:



Keterangan :

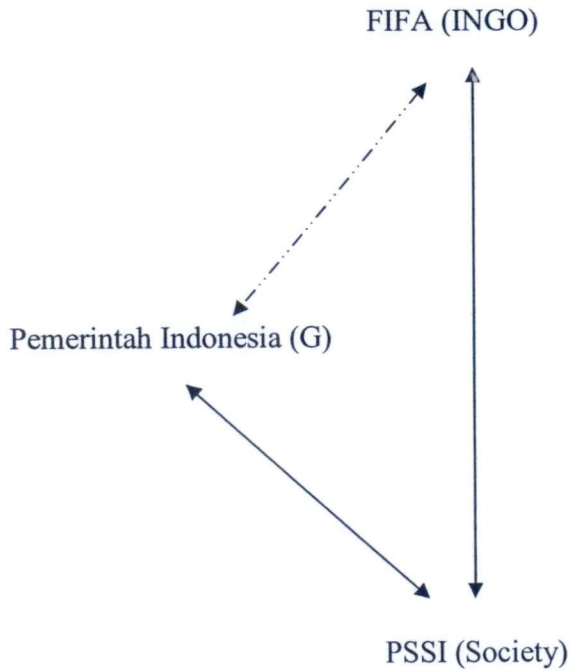
INGO = International non-Government Organization = organisasi internasional non-pemerintah

G = Government = pemerintah

S = Society = Masyarakat

Gambar 1.2

Aplikasi: pola hubungan segitiga antara FIFA, Pemerintah Republik Indonesia, dan PSSI



Keterangan :

----- perantara atau hubungan tidak langsung

————— hubungan langsung

Gambar II menjelaskan hubungan segi tiga antara FIFA, pemerintah Indonesia, dan PSSI. Dipaparkan bahwa FIFA mempunyai hubungan langsung dengan PSSI dan tidak langsung dengan pemerintah Indonesia, dan sebaliknya. Sebagai fakta dalam kasus penelitian ini, dimana ketika PSSI mempunyai hubungan tidak baik dengan FIFA yaitu saat PSSI melanggar aturan FIFA, maka PSSI harus menyelesaikannya langsung dengan FIFA. Namun ketika PSSI tidak bisa menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia bisa turun langsung untuk melakukan pembicaraan dengan FIFA tentang penyelesaian masalah PSSI, dan harus konsultasi sebelumnya dengan FIFA.

Berdasarkan fenomena diplomasi suatu pemerintah terhadap organisasi internasional non-pemerintah. Penulis memberikan sebuah konsep dengan nama *GINGO Diplomacy*, yaitu *Government to International non-Governmental Organization Diplomacy*. Namun dalam menjelaskan permasalahan di dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan konsep diplomasi yang sudah diakui banyak pakar hubungan internasional.

1. Konsep Diplomasi Virtual

Pengertian tentang diplomasi sudah banyak dipaparkan oleh para ahli, seperti yang sering digunakan oleh banyak kalangan diantaranya pengertian dalam kamus Oxford, dimana kata diplomasi menunjuk pada sebuah manajemen hubungan negosiasi internasional dengan cara pengiriman duta besar dan utusan resmi Negara. Dengan kata lain diplomasi adalah bisnis dan seni para diplomat.²⁰ Sedangkan, Ellis Briggs mengatakan diplomasi sebagai sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim utusan untuk mewakili pemerintah.²¹

Selanjutnya, seorang bernama Barston mendefinisikan Diplomasi sebagai manajemen hubungan antar Negara atau hubungan Negara dengan actor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan actor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik senjata, karena utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaan dengan cara melakukan persuasi yang terus-menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.²²

Seiring dengan perkembangan dunia internasional dengan bertambahnya jumlah aktor dalam hubungan internasional dan didukung juga kemajuan teknologi, maka muncul juga tipe – tipe diplomasi baru dan modern, salah satu diantaranya yaitu diplomasi Virtual. Diplomasi ini diperkenalkan pertama kali oleh E.J. Dionne Jr. Melalui tulisannya dalam

²⁰ Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur*, 2000, hal. xxii

²¹ <http://www.scribd.com/doc/82786730/diplomasi>

²² Britain: Hartnolls Limited, 1995. hal. 1, terjemahan oleh Selvy Violita, S2 FISip UI 2010

majalah yang terbit di Washington pada Mei 2008. Menurut Dionne Jr. *Diplomasi virtual meliputi pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi dan praktek hubungan internasional yang dipengaruhi oleh bantuan teknologi komunikasi dan informasi*. Pada saat ini, ragam teknologi komunikasi dan informasi sangat bervariasi, mulai dari televisi, email, telepon genggam, hingga internet.²³

Olesya M. Grech mengatakan akan adanya perubahan perilaku hubungan antar negara, khususnya dalam bidang diplomasi, dari aktivitas diplomasi yang bersifat interaksi riil dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat, menjadi aktivitas diplomasi yang bersifat realitas imajinatif, atau '*virtual diplomacy*'.²⁴

Dikatakan juga, diplomasi Virtual dicirikan mempunyai karakteristik antara lain;

pertama penggunaan '*information and communication technology*' atau ICT yang sangat dominan sehingga menggeser peran manusia secara fisik untuk berhubungan dalam aktivitas diplomasi. Peran '*world wide web*' atau '*www*' menggantikan dan menggeser proses pertukaran informasi dan negosiasi antar berbagai aktor internasional dan mendorong munculnya masyarakat internasional baru yang bersifat '*maya*'. Ciri kedua, adalah terjadi pergeseran aktor diplomasi, yakni dari diplomat profesional, menjadi '*admin*' atau personalia pengolah data dalam alamat web. Ketiga, aktivitas diplomasi tidak lagi berpusat di pusat pemerintahan, tetapi aktivitas diplomasi virtual muncul secara sporadik dari segenap penjuru '*pelontar*' informasi antar bangsa, dengan bahasa internasional, di pelosok-pelosok negara sekalipun.²⁵

Mendukung pernyataan di atas, diplomasi - diplomasi masa kini dalam banyak praktiknya dipengaruhi oleh revolusi teknologi informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Harold Nicholson "*perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan peran dan fungsi seorang Duta Besar semakin berkurang dan diplomat-diplomat merosot statusnya sebagai tenaga administrasi*".²⁶

²³ Muhammad Shoelhi, *Diplomasi, praktik komunikasi internasional*, Simbiosi Rekatama Media, Bandung, 2011, hal.166

²⁴ Olesya M. Grech, *Virtual Diplomacy, Diplomacy of The Digital Age*, hal. 20-24, University of Malta, 2006. Diambil dari Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta. 2013, hal..177

²⁵ Ibid, hal. 177-178

²⁶ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Graha Ilmu 2012, Yogyakarta, hal. 59

Selain itu, dijelaskan oleh Barry Fulton,

“.... Negara-negara yang sebelumnya dihubungkan oleh Kementerian Luar Negeri dan aktivitas perdagangan, sekarang terhubung melalui aktivitas komunikasi antar individu melalui teknologi serat optik, satelit, wireless, yang merupakan bagian dari sebuah jaringan yang kompleks dan tanpa pengawasan terpusat. Teknologi dan informasi menyebabkan waktu dan tempat bukan lagi masalah yang relevan, sehingga diplomasi tradisional berjuang untuk mempertahankan relevansinya”.²⁷

Semua pendapat serta definisi diplomasi dari para ahli yang dipaparkan penulis di atas mengandung makna hampir sama dan berkaitan satu sama lainnya. Disamping itu, perkembangan teknologi menambah aktor dalam diplomasi, dimana pada awalnya diplomasi dilakukan oleh pemerintah saja melalui duta besarnya, namun sekarang dilakukan juga oleh masyarakat dan organisasi di luar pemerintahan. Media yang digunakan begitu banyak tersedia saat ini, mulai dari media tulis sampai dengan media elektronik. Langkah diplomasi diambil agar memperkuat hubungan yang sudah terjalin sebelumnya, karena bagaimanapun setiap hubungan terkadang ada kalanya sangat baik dan kurang baik. Begitu juga dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia ataupun PSSI, mereka mengambil langkah diplomasi kepada Federasi sepakbola dunia (FIFA) untuk memperbaiki kesalahannya serta melanjutkan hubungan yang sudah lama terbina.

2. Konsep Diplomasi Multi Jalur (Multitrack)

Konsep diplomasi ini merupakan bagian dari diplomasi publik yang sebelumnya dikenal dengan istilah diplomasi jalur dua (Second track diplomacy). Diplomasi multitrack melibatkan 9 elemen masyarakat, antara lain,²⁸

1. Jalur pertama atau pemerintah. Pelaku diplomasi adalah Departemen Luar Negeri, para pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Mereka semua membuka jalan bagi upaya perdamaian
2. Kelompok NGO/kalangan profesional non-pemerintah. Mereka bertujuan mengorganisir, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik-konflik internasional.

²⁷ Barry Fulton, *Reinventing Diplomacy in Information Age*, CSIS Washington D.C, 1998. Diambil dari *Dipomasi antara Teori dan Praktek*, Sukawarsini Djelantik, Graha Ilmu 2012, Yogyakarta, hal. 68

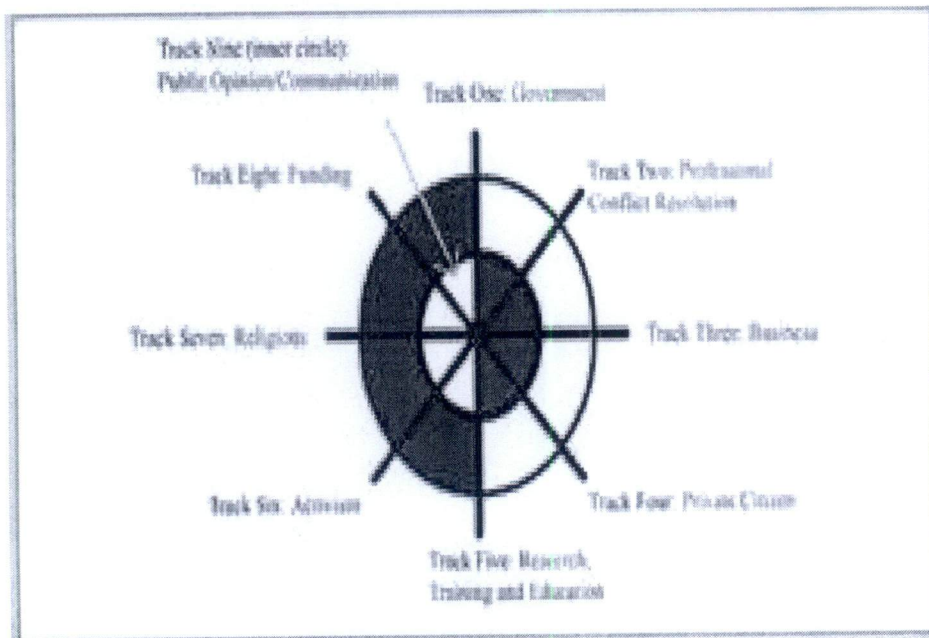
²⁸ *Ibid*, hal. 218-219

3. Kelompok bisnis atau para pelaku ekonomi dan perdangan. Mereka bisa menyediakan lapangan pekerjaan, kesempatan bisnis, kerjasama perdagangan, sehingga menumbuhkan saling pengertian diantara bangsa-bangsa di dunia.
4. Warga negara biasa atau juru damai perorangan. Di dalamnya terdapat upaya masyarakat yang terlibat untuk aktivitas perdamaian maupun pembangunan, program pertukaran, organisasi swasta perorangan, organisasi bukan pemerintah dan kelompok kepentingan khusus.
5. Aktivitas penelitian, pelatihan, pendidikan atau perdamaian melalui pembelajaran. Tiga hal tersebut saling berkaitan, dimana kegiatan penelitian yang berkaitan dengan program universitas, pusat kajian, pusat penelitian, program pelatihan yang tujuannya memberi pelatihan dan keterampilan praktis seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, fasilitasi pihak ketiga, dan sarana pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai program doktor. Aktivitas-aktivitas ditawarkan sangat beragam dengan jangkauan global atau lintas budaya, studi tentang perdamaian dan tatanan dunia, manajemen dan resolusi konflik.
6. Aktivisme, atau juru damai melalui advokasi. Jalur ini mencakup bidang perdamaian dan lingkungan seperti masalah pelucutan senjata, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, dan advokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan khusus.
7. Kelompok agama, atau melalui penebalan keimanan. Di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan spiritual oleh komunitas-komunitas agama yang berasaskan ajaran moral, perdamaian, pesantren, dan ajaran untuk tidak memakai kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan.
8. Perdamaian melalui penyediaan dana. Kegiatan ini mengacu pada organisasi-organisasi keuangan berbentuk yayasan maupun sumbangan perorangan dalam menyediakan dana bagi program-program yang dilakukan jalur-jalur diplomasi lain.
9. Komunikasi dan media, atau perdamaian melalui penyediaan informasi. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari suara rakyat; bagaimana opini

publik dibentuk dan diekspresikan oleh media massa baik cetak maupun elektronik.

Gambar 1.3

Sembilan jalur pada Diplomasi Multijalur²⁹



Sumber: Diamond dan Mc Donald, 1991, *Multitrack Diplomacy, A System Approach to Peace*, 3 Edition, hal.15

Konsep diplomasi multi jalur yang diambil penulis dalam tulisan ini adalah diplomasi multi track jalur pertama. Dimana dijelaskan Jalur pertama dalam hubungan diplomasi dengan pemerintah, organisasi atau aktor hubungan internasional lainnya yang berperan adalah pemerintah. Tindakan itu bisa dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, para pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Mereka semua membuka jalan bagi upaya perdamaian.

Kasus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang akan menghadapi sanksi dari FIFA, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga berusaha melakukan

²⁹<https://id.images.search.yahoo.com/search/images>

lobi para pembuat keputusan FIFA, supaya memberikan kesempatan Indonesia untuk menyelesaikan kasus sepakbola nasional. Sehingga terhindar dari hukuman berat FIFA.

G. Hipotesa

Setelah melihat penjelasan dari latar belakang masalah dan kerangka teori di atas, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui menpora melakukan diplomasi dengan menghubungi langsung aktor-aktor yang berpengaruh di FIFA
2. Mengirimkan utusan kepada FIFA untuk melakukan negosiasi

H. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode atau cara melakukannya sehingga penelitian tersebut mampu menemukan dan mencapai tujuannya. Beberapa bentuk dan jenis penelitian bisa mempengaruhi metode penelitian atau bisa dikatakan untuk mempermudah penelitian, metode penelitian yang diambil harus sesuai dan sejalan dengan jenis penelitian. Dalam tulisan yang berjudul "Diplomasi Indonesia Kepada Federation Internationale de Football Association (FIFA), Studi Kasus; Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) 2011-2013", penulis menyusun tulisan berupa tesis ini dengan menggunakan metode penelitian sebagaimana yang dijelaskan John Creswell (2008). Dimana ia mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahi suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti melakukan tahapan-tahapan seperti; 1) Mewawancarai para peserta penelitian atau partisipan dengan menanyai pertanyaan yang umum dan agak luas. 2) Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. 3) Hasil analisis itu dapat berupa menggambarkan atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. 3) Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat. 4) Sesudahnya peneliti kemudian menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmunan lain yang dibuat sebelumnya. 5) Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk

laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif.³⁰

Penyusun dalam tulisan sudah melakukan penelitian dengan mengambil langkah – langkah, diantaranya;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dimana metode ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta penyelesaian permasalahan antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dengan badan sepakbola dunia FIFA melalui diplomasi virtual dan diplomasi multi jalur. Selain itu, dalam tulisan akan digambarkan tentang posisi PSSI dan FIFA dalam permasalahan itu.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mencoba untuk menghindari pembahasan yang terlalu jauh mengenai praktek diplomasi pemerintah kepada FIFA. Jadi penulis memfokuskan pada permasalahan PSSI dari 2011, yaitu permasalahan munculnya Liga Premier Indonesia sebagai tandingan Liga Super Indonesia, sampai perkara PSSI 2013 yaitu adanya konflik PSSI versus KPSI. Kemudian, penelitian ini fokus pada praktek diplomasi pemerintah kepada FIFA tahun 2013 untuk penyelesaian kisruh PSSI.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam tulisan menggunakan metode studi pustaka (*library reseach*) yaitu mengumpulkan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian literatur akan dianalisis. Literatur penelitian berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen, dan situs-situs dari website di internet. Untuk lebih mandapatkan penelitian yang bagus, maka membutuhkan data-data yang valid, oleh sebab itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber terkait seperti diantaranya:

³⁰ Raco J.R., Metode Penelitian Kualitatif, jenis karakteristik dan keunggulannya, Grasindo, Jakarta, hal. 7

a. Dokumen

Dokumen-dokumen untuk menelusuri permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini diambil sesuai dengan pembahasan baik itu berupa tulisan-tulisan dan gambar yang terdapat di dalam buku, jurnal, semua bisa berhubungan dengan pembahasan diplomasi pemerintah kepada badan sepakbola dunia.

b. Observasi

Dilakukanya observasi oleh penulis sebagai pematangan langsung dalam area terkait. Hal itu dilakuakn agar lebih mengetahui kebijakan pengambilan keputusan diplomasi pemerintah kepada FIFA.

c. Wawancara

Pengambilan data dengan langsung bertemu aktor yang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang di bahas dalam penelitian. Dimana informan yang dipilih peneliti adalah para pengurus PSSI pusat dan Menpora sebagai pelaku diplomasi. Fakta-fakta di lapangan bahwa peneliti bertemu dengan salah satu pengurus PSSI pusat yaitu pak Sauqi, kemudian wawancara melalu email dengan pengurus PSSI Bogor bagian Sponsor, teman dekat Djohar Arifin yaitu Andi Mulia. Terakhir data diperoleh melalui wawancara dengan Roy Suryo, mantan Menpora.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penulisan adalah analisis data kualitatif. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk karya tertulis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan informasi kepada pembaca tentang isi yang ditulis dalam ketikan ini, maka penyusun memaparkan sistematika penulisan dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

Bab Satu. Dalam bab ini berisi mengenai; A) Latar Belakang Masalah, B) Tujuan Riset, C) Kontribusi Riset, D) Rumusan Masalah, E) Orisinal Riset, F) Studi Pustaka, G) Kerangka Pemikiran, H) Hipotesa, I) Metode Penelitian, dan J) Sistematika Penulisan.

Kemudian pada bab dua, Penulis akan memaparkan tentang organisasi Sepakbola Internasional yaitu Federation International de Football Association (FIFA). Dimana akan diungkapkan mengenai kemunculan dan wewenang, FIFA, serta keputusan dan sanksi FIFA.

Kemudian pada bab tiga penulis akan membahas fakta tentang dinamika konflik PSSI dengan ancaman sanksi FIFA. Bab selanjutnya yaitu bab empat akan menyajikan permasalahan utama yang dibahas dalam tulisan ini yaitu Bagaimana Diplomasi dan Tindakan Pemerintah Indonesia Melalui Menpora Kepada FIFA Supaya PSSI Tidak Mendapat Sanksi FIFA, terkait Dualisme PSSI (2013). Terakhir adalah bab lima. Disini akan berisi kesimpulan dari seluruh bab-bab sebelumnya dan saran serta merupakan pembahasan terakhir atau penutup penulisan tesis ini